

Etika Komunikasi Qur'ani dalam Menghadapi Polarisasi Sosial: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat *Qaul* dalam Al-Qur'an

Haidar Idris

Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
haidaridris8@gmail.com

Submit : **30/11/2025** | Review : **12/12/2025** s.d **26/12/2025** | Publish : **27/12/2025**

Abstract

Social polarization has become one of the most critical issues in contemporary public communication, particularly in digital spaces marked by misinformation, hate speech, prejudice, verbal aggression, and identity-based conflict. This article examines the ethical principles of Qur'anic communication embedded in the *qaul* verses and constructs them as a normative-conceptual framework for mitigating social polarization. This study employs a qualitative library research design using a thematic-contextual exegetical method. The primary corpus consists of Qur'anic verses containing the formulations *qaulan sadīdan*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan balīghan*, *qaulan karīman*, *qaulan maysūran*, and *qaulan layyinān*. The data were analyzed through verse identification, classification of communicative contexts, examination of classical and contemporary Qur'anic exegesis, and contextualization of their ethical meanings in relation to contemporary problems of social communication. The findings reveal that the Qur'an establishes an ethics of communication through six core principles: truthfulness, civility, dialogical gentleness, transformative effectiveness, respect for human dignity, and inclusive communication that promotes reassurance and social harmony. These principles can function as an ethical framework for countering disinformation, reducing verbal aggression, preventing dehumanization, protecting vulnerable groups, and opening spaces for dialogue and reconciliation. This article contributes to Qur'anic exegesis, Islamic studies, and communication ethics by shifting the interpretation of the *qaul* verses from a merely normative description toward a contextual framework for addressing contemporary social fragmentation.

Keywords : *Qur'anic communication ethics; qaul verses; thematic exegesis; social polarization; public communication*

Pendahuluan

Perkembangan ruang publik digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat membentuk opini, mengelola perbedaan, dan membangun relasi sosial. Perubahan ini memang membuka akses komunikasi yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan persoalan baru berupa polarisasi sosial, fragmentasi wacana, ujaran kebencian, misinformasi, disinformasi, dan komunikasi agresif yang beredar secara massif di berbagai platform. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa media digital kerap berasosiasi dengan meningkatnya polarisasi politik dan sosial, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa misinformasi, disinformasi, dan *hate speech* kini menyebar dengan volume, kecepatan, dan viralisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengganggu integritas ruang informasi. Dalam konteks ini, problem komunikasi sosial dewasa ini tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis penyampaian pesan, melainkan juga sebagai persoalan etis tentang bagaimana manusia berbicara, merespons perbedaan, dan memperlakukan pihak lain di ruang publik (Lorenz-Spreen et al., 2022).

Dampak dari polarisasi sosial tersebut sangat serius bagi kehidupan bersama. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *hate speech* menegaskan bahwa ujaran kebencian merusak kohesi sosial, mengikis nilai bersama, dan dapat menjadi landasan bagi kekerasan. UNESCO juga menegaskan bahwa *hate speech*, baik daring maupun luring, berpotensi menyulut kekerasan, melanggar hak-hak individual dan kolektif, serta melemahkan kohesi masyarakat. Dengan demikian, polarisasi sosial bukan hanya menghasilkan keterbelahan opini, tetapi juga melahirkan suasana saling curiga, dehumanisasi, delegitimasi antarkelompok, dan penurunan kualitas relasi sosial-keagamaan. Ketika komunikasi publik didominasi oleh olok-olok, fitnah, penghinaan, dan provokasi, yang terancam bukan hanya ketertiban diskursif, melainkan juga keutuhan masyarakat sebagai komunitas moral yang hidup bersama dalam perbedaan (Nations, 2020).

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya etika komunikasi sebagai instrumen untuk meredam konflik sosial. Penelitian tentang norma

sosial dan depolarisasi menunjukkan bahwa dalam situasi yang sangat terpolarisasi, penekanan pada dialog terbuka, penghormatan, toleransi, dan identitas bersama dapat membantu mengurangi permusuhan antarkelompok. Bahkan, dalam kerangka kebijakan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNESCO menempatkan pendidikan, penghormatan martabat manusia, dialog antarkelompok, dan penguatan keterampilan sosial-emosional sebagai bagian dari respons terhadap ujaran kebencian (Lubbers et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang sehat tidak cukup diukur dari efektif atau tidaknya pesan, tetapi juga dari orientasi etikanya: apakah ia menjaga kebenaran, menghindari luka sosial, mengakui martabat lawan bicara, dan membuka kemungkinan rekonsiliasi.

Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi sejak awal memang diikat oleh dimensi etik yang kuat. Al-Qur'an menggunakan sejumlah formulasi *qaul* untuk membimbing manusia dalam bertutur, antara lain *qaulan sadīdan* pada QS. al-Ahzab [33]:70, *qaulan ma'rūfan* pada QS. al-Nisa' [4]:5, *qaulan balīghan* pada QS. al-Nisa' [4]:63, *qaulan karīman* pada QS. al-Isra' [17]:23, *qaulan maysūran* pada QS. al-Isra' [17]:28, dan *qaulan layyinan* pada QS. Taha [20]:44. Ragam konsep tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menghendaki komunikasi yang benar, tetapi juga komunikasi yang baik, menyentuh, memuliakan, menenangkan, dan lemah lembut. Dengan kata lain, Al-Qur'an menawarkan prinsip etika komunikasi yang tidak sekadar mengatur isi ujaran, tetapi juga suasana, orientasi, dan dampak sosial dari ujaran itu sendiri.

Meskipun demikian, kajian terdahulu tentang etika komunikasi Qur'ani umumnya masih bergerak pada wilayah normatif-deskriptif. Beberapa penelitian menelaah etika komunikasi Qur'ani di media sosial melalui Surah al-Hujurat, sebagian lain memfokuskan pembahasan pada *qawlan ma'rūfa*, *qaulan sadīda*, atau enam nilai *qaulan* dalam komunikasi digital. Khasanah menyoroiti etika komunikasi Qur'ani di media sosial berbasis

Surah al-Hujurat (Khasanah, 2019), Erawati dan Lisnawati membahas etika komunikasi Islam di media sosial dalam konteks keluarga (Desi Erawati, 2019), Khairuddin dan kolega mengupas internalisasi *qawlan ma'rūfa* (Khairuddin et al., 2023), Hulawa dan Kasmianti memfokuskan diri pada *qaulan sadīda* dalam era digital (Hulawa & Kasmianti, 2025), sedangkan Wahyudi dan kolega mengkaji nilai-nilai *qaulan* dalam komunikasi digital secara umum (Wahyudi et al., 2025). Penelusuran ini menunjukkan bahwa ayat-ayat *qaul* telah banyak dibahas, tetapi belum banyak dirumuskan sebagai kerangka etika komunikasi Qur'ani yang secara eksplisit diarahkan untuk membaca dan memitigasi polarisasi sosial. Pernyataan terakhir ini merupakan inferensi dari pola literatur yang tersedia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini hadir untuk mengisi celah kajian melalui pendekatan tafsir *mawdu'i* atas ayat-ayat *qaul* dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena tafsir tematik memungkinkan ayat-ayat yang tersebar dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dibaca secara integral sehingga menghadirkan pandangan Qur'ani yang lebih utuh dan kontekstual terhadap persoalan komunikasi kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan mendasar: *pertama*, bagaimana Al-Qur'an membangun prinsip etika komunikasi melalui ayat-ayat *qaul*; *kedua*, bagaimana prinsip-prinsip *qaul* tersebut dapat dibaca dalam konteks polarisasi sosial; dan *ketiga*, bagaimana konstruksi etika komunikasi Qur'ani dapat dirumuskan sebagai kerangka mitigasi polarisasi sosial. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip etika komunikasi dalam ayat-ayat *qaul*, mengkontekstualisasikannya dengan problem polarisasi sosial, serta merumuskan kerangka etika komunikasi Qur'ani sebagai tawaran normatif-konseptual untuk mereduksi polarisasi tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini tidak berhenti pada penjelasan makna normatif ayat-ayat *qaul*, tetapi melangkah lebih jauh pada aspek aplikatifnya. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menggeser kajian

ayat-ayat *qaul* dari pembacaan yang bercorak normatif-deskriptif menuju pembacaan tematik-kontekstual yang menjadikan prinsip komunikasi Qur'ani sebagai kerangka mitigasi polarisasi sosial. Klaim kebaruan ini ditopang oleh fakta bahwa literatur yang telah terpetakan sejauh ini lebih banyak berfokus pada ranah etika media sosial, komunikasi keluarga, satu konsep *qaul* tertentu, atau penerapan nilai *qaulan* dalam komunikasi digital secara parsial. Sementara itu, formulasi komprehensif ayat-ayat *qaul* sebagai kerangka etik terpadu untuk menghadapi polarisasi sosial masih relatif terbuka. Pada akhirnya, arah penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan secara kontributif bahwa Al-Qur'an bukan hanya sumber adab personal dalam berbicara, tetapi juga sumber etika sosial yang sangat relevan bagi perawatan kohesi masyarakat di tengah fragmentasi ruang publik modern.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik. Pilihan ini bukan sekadar karena objeknya berupa teks, melainkan karena fokus penelitian berada pada satu gugus istilah Qur'ani, yaitu *qaul* beserta formulasi etikanya, yang harus dibaca secara menyeluruh lintas ayat, lalu dikontekstualisasikan dengan problem polarisasi sosial di ruang publik kontemporer. Dalam literatur metodologi tafsir, *tafsir maudhu'i* dipahami sebagai cara membaca Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang bertema sama, menertibkannya, memperhatikan keterkaitan antarayat, lalu menyusun simpulan tematik yang utuh. Di saat yang sama, salah satu bentuk *tafsir maudhu'i* memang bergerak pada level istilah atau kosa kata Al-Qur'an, sehingga sangat relevan untuk penelitian yang menjadikan *qaul* sebagai poros analisis (Yamani, 2015).

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggabungkan dua gerak metodologis sekaligus. *Pertama*, gerak leksikal, yakni menelusuri seluruh

bentuk utama *qaulan* yang menjadi dasar etika komunikasi Qur'ani. *Kedua*, gerak kontekstual, yakni membaca kembali hasil penafsiran ayat-ayat tersebut dalam horizon persoalan sosial mutakhir, terutama maraknya misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan degradasi integritas informasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan dapat memicu konflik, mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. OECD juga menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu dan menyesatkan berkontribusi pada polarisasi dan melemahkan kepercayaan publik (United Nations in Indonesia, 2024). Karena artikel ini berbentuk kajian kepustakaan kualitatif, pelaporan metode disusun secara transparan dengan merujuk pada prinsip *Standards for Reporting Qualitative Research* yang direkomendasikan EQUATOR untuk penelitian kualitatif (O'Brien et al., 2014).

Corpus primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat formulasi etik berbasis term *qaulan*. Berdasarkan pemetaan awal terhadap ayat-ayat yang relevan, fokus penelitian mencakup *qaulan sadidan* pada QS. al-Nisa' [4]: 9 dan QS. al-Ahzab [33]: 70; *qaulan ma'rufan* pada QS. al-Baqarah [2]: 235, QS. al-Nisa' [4]: 5, QS. al-Nisa' [4]: 8, serta QS. al-Ahzab [33]: 32; *qaulan balighan* pada QS. al-Nisa' [4]: 63; *qaulan kariman* pada QS. al-Isra' [17]: 23; *qaulan maysuran* pada QS. al-Isra' [17]: 28; dan *qaulan layyinan* pada QS. Taha [20]: 44. Penyertaan QS. al-Ahzab [33]: 32 untuk kategori *qaulan ma'rufan* penting agar corpus tetap lengkap, karena literatur terdahulu mencatat bahwa formulasi ini tidak berhenti pada tiga ayat yang paling sering disebut, tetapi juga hadir dalam konteks etika tutur kepada istri-istri Nabi.

Dalam penelitian ini, unit analisis tidak dibatasi pada "ayat" sebagai satuan formal, tetapi meliputi empat lapis sekaligus: frasa kunci *qaulan* sebagai satuan leksikal; konteks intratekstual ayat sebelum dan sesudahnya; konteks komunikatif ayat, seperti keluarga, distribusi sosial, dakwah, relasi dengan kekuasaan, atau pembinaan moral; serta penjelasan para mufasir terhadap orientasi etik dari tiap formulasi. Desain

seperti ini dipilih karena *tafsir maudhu'i* tentang istilah dan tema Qur'ani menuntut pengumpulan ayat, penertiban menurut keterkaitan tematik, analisis tafsir, dan pengkodean unsur utama dari tema yang sedang diteliti (Rokim & Triana, 2021).

Untuk memperjelas ruang lingkup data, peta corpus penelitian dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1. Peta Corpus Penelitian

Formulasi Qaul	Ayat Utama	Konteks Pokok	Fokus Etik Awal
<i>Qaulan sadidan</i>	QS. al-Nisa' 4:9; QS. al-Ahzab 33:70	Tanggung jawab moral, ketakwaan, kebenaran tutur	Benar, jujur, tepat
<i>Qaulan ma'rufan</i>	QS. al-Baqarah 2:235; QS. al-Nisa' 4:5, 4:8; QS. al-Ahzab 33:32	Keluarga, pengelolaan harta, relasi sosial, kepantasan tutur	Baik, pantas, santun

Tabel tersebut tidak dimaksudkan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai peta kerja analitis. Dengan peta ini, penelitian dapat bergerak dari identifikasi term menuju pembacaan etika komunikasi yang lebih sistematis dan kontekstual.

Sumber data primer penelitian adalah Al-Qur'an sebagai teks utama. Untuk memastikan ketepatan penempatan corpus ayat dan terjemah kerja berbahasa Indonesia, penelitian memanfaatkan rujukan digital Al-Qur'an dari Qur'an Kementerian Agama dan sumber digital Al-Qur'an lain yang menampilkan teks Arab, transliterasi, terjemah, serta keterkaitan antar-ayat. Penggunaan sumber digital pada tahap identifikasi ayat berfungsi teknis untuk pemetaan corpus, sedangkan otoritas makna tetap diletakkan pada pembacaan tafsir.

Sumber data sekunder dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama adalah kitab-kitab tafsir yang diperlakukan sebagai sumber penjelas makna, mencakup tafsir klasik, modern, dan kontemporer, seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Tabari, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kathir, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubi, *Tafsīr al-Marāghī*, *Tafsir al-Mishbah*,

dan *Tafsir Kementerian Agama RI*. Pemilihan yang berlapis ini memungkinkan penelitian menangkap kontinuitas dan pergeseran penekanan penafsiran, sehingga makna etik dari ayat-ayat *qaul* tidak dibaca secara tunggal atau ahistoris. Dalam uraian metodologis tafsir *maudhu'i*, pembacaan terhadap beberapa kitab tafsir induk justru dianjurkan agar peneliti dapat mengumpulkan ragam penjelasan makna sebelum melakukan kategorisasi dan sintesis (Rokim & Triana, 2021).

Klaster kedua adalah literatur konseptual yang dipakai untuk mengontekstualisasikan hasil tafsir ke dalam problem sosial mutakhir, terutama literatur tentang etika komunikasi, polarisasi sosial, integritas informasi, serta ujaran kebencian di ruang digital. Sumber-sumber konteks ini tidak diposisikan untuk “mengganti” tafsir, melainkan untuk menyediakan horizon problem yang sedang direspons oleh penelitian. Pilihan tersebut sejalan dengan tahapan *tafsir maudhu'i* yang mensyaratkan agar tema yang diteliti benar-benar hadir dalam Al-Qur'an sekaligus berkaitan dengan isu aktual di masyarakat.

Prosedur analisis penelitian ini disusun secara bertahap dan bergerak dari teks ke konteks. Tahap pertama adalah penetapan tema dan rumusan problem. Pada tahap ini, peneliti menempatkan polarisasi sosial sebagai masalah etik-komunikatif yang menuntut pembacaan Qur'ani. Dalam metodologi *tafsir maudhu'i*, langkah awal memang menuntut peneliti menentukan tema yang jelas, urgensinya bagi masyarakat masa kini, serta tujuan spesifik yang hendak dicapai oleh penelitian. Dengan demikian, tema “etika komunikasi Qur'ani” tidak dipilih secara abstrak, melainkan sebagai jawaban atas problem sosial yang ditandai oleh ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi.

Tahap kedua adalah inventarisasi dan delimitasi corpus ayat. Pada tahap ini, seluruh formulasi *qaulan* yang relevan dihimpun, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan istilah dan kedekatan fungsi komunikatifnya. Untuk kategori *qaulan ma'rufan*, misalnya, peneliti tidak hanya berhenti pada ayat-ayat yang berhubungan dengan pengelolaan

harta dan pinangan, tetapi juga memasukkan konteks etika tutur dalam QS. al-Ahzab [33]: 32 agar medan maknanya tidak tereduksi. Tahap inventarisasi seperti ini merupakan inti dari *tafsir maudhu'i* pada level istilah, yakni mengumpulkan semua ayat yang mengandung kosa kata yang diteliti sebelum dilakukan analisis lebih jauh (Anggraini, 2023).

Tahap ketiga adalah pembacaan intratekstual dan komparasi tafsir. Setiap ayat dibaca dalam konteks susunan ayatnya, lalu dibandingkan penjelasannya dalam beberapa kitab tafsir. Tujuan komparasi bukan untuk mencari mufasir yang “paling benar”, tetapi untuk menangkap irisan, penekanan, dan perluasan makna dari masing-masing term *qaulan*. Pada tahap ini, peneliti menandai unsur semantik, situasi tutur, sasaran komunikasi, serta orientasi moral yang ditekankan oleh mufasir. Dalam kerangka *tafsir maudhu'i*, tahap ini identik dengan analisis ayat-ayat yang telah dihimpun melalui rujukan kepada kitab tafsir, khususnya tafsir-tafsir induk, sebelum dilakukan pengkodean unsur utama tema.

Tahap keempat adalah pengkodean dan kategorisasi tematik. Setelah pembacaan tafsir dilakukan, peneliti menyusun kode-kode analitis, misalnya “kebenaran”, “kepantasan”, “kelembutan”, “efektivitas pesan”, “penghormatan martabat”, dan “komunikasi yang menenangkan”. Di sini, penelitian memanfaatkan logika *thematic analysis* sebagai perangkat bantu untuk merapikan pola makna yang muncul dari hasil pembacaan tafsir. Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik bergerak melalui proses familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, lalu penyusunan laporan (Braun & Clarke, 2006). Dalam penelitian ini, logika tersebut diadaptasi ke dalam studi tafsir: data yang “dibaca berulang” bukan wawancara, melainkan ayat dan penjelasan tafsir; sedangkan “tema” yang lahir bukan tema sosiologis murni, tetapi kategori etik-komunikatif Qur'ani.

Tahap kelima adalah kontekstualisasi. Setelah tema etik dari masing-masing formulasi *qaulan* ditemukan, peneliti mempertemukannya dengan problem polarisasi sosial kontemporer. Pada tahap ini, *qaulan*

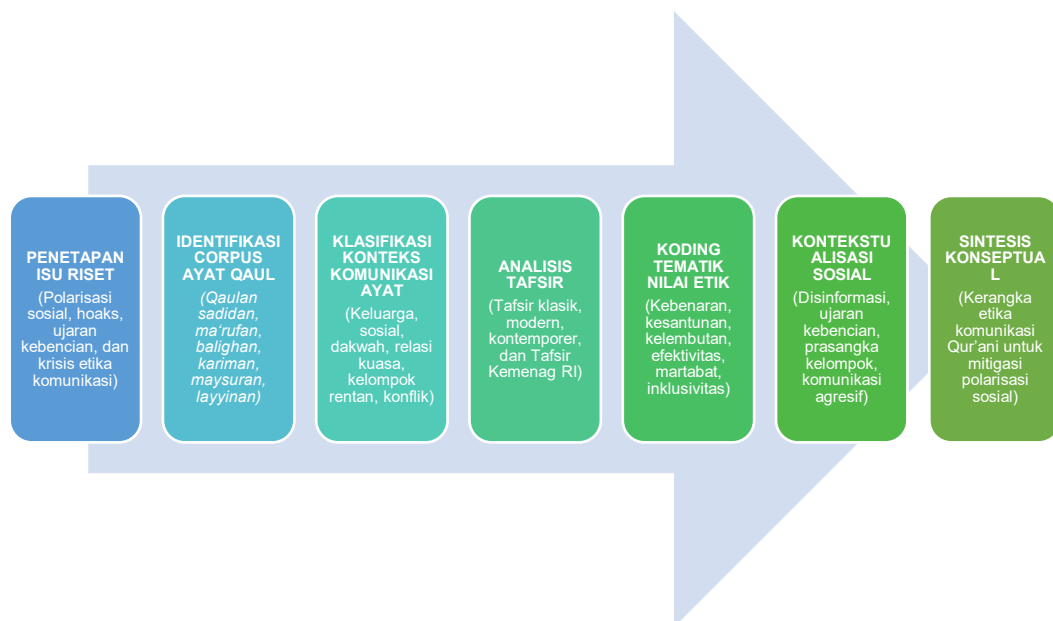
sadidan dibaca dalam hubungannya dengan akurasi informasi dan penolakan terhadap manipulasi; *qaulan ma'rufan* dengan kepantasan dan kesantunan sosial; *qaulan layyinan* dengan komunikasi non-agresif; *qaulan balighan* dengan efektivitas nasihat; *qaulan kariman* dengan penghormatan atas martabat manusia; dan *qaulan maysuran* dengan komunikasi yang empatik kepada pihak rentan. Langkah kontekstual ini menjaga agar hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi terminologis, melainkan menghasilkan kerangka etik yang dapat menjawab persoalan sosial mutakhir yang juga disorot oleh PBB, UNESCO, dan OECD sebagai ancaman serius bagi kohesi sosial dan integritas ruang informasi (United Nations in Indonesia, 2024).

Tahap keenam adalah sintesis konseptual. Dari seluruh proses di atas, peneliti merumuskan konstruksi etika komunikasi Qur'ani sebagai tawaran normatif-konseptual untuk mitigasi polarisasi sosial. Sintesis ini tidak dibangun dengan cara menempelkan ayat pada teori sosial secara mekanis, tetapi melalui dialog bertahap: ayat dihimpun, ditafsirkan, dikodekan, lalu dikontekstualisasikan. Hasil akhirnya diharapkan berupa kerangka etika komunikasi yang tetap berakar pada Al-Qur'an, tetapi cukup operasional untuk dibaca dalam realitas komunikasi publik masa kini. Desain sintesis seperti ini juga sejalan dengan uraian metodologis *tafsir maudhu'i* yang menekankan bahwa hasil penelitian harus memberi faedah tematik dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk menjaga keabsahan interpretasi, penelitian ini menerapkan tiga strategi. Pertama, triangulasi rujukan tafsir, yaitu membandingkan penjelasan beberapa mufasir dari periode yang berbeda agar simpulan tidak bertumpu pada satu otoritas penafsiran saja. Kedua, disiplin terhadap langkah *tafsir maudhu'i*, terutama pada tahap penghimpunan ayat, pembacaan komprehensif, kategorisasi, dan penghindaran pemaksaan makna. Ketiga, transparansi prosedur, dengan menjelaskan secara terbuka bagaimana data dihimpun, dikodekan, dan dikontekstualisasikan, sebagaimana semangat yang ditekankan dalam SRQR. Literatur

metodologi tafsir juga mengingatkan bahwa penelitian *maudhu'i* tidak boleh sejak awal didahului tujuan subjektif untuk mencari pembenaran atas pendapat peneliti; jika itu terjadi, ayat akan dipaksa untuk mendukung asumsi yang sudah lebih dahulu jadi.

Untuk memperjelas alur kerja penelitian, proses analisis dalam artikel ini disusun melalui beberapa tahap yang saling berhubungan. Tahapan tersebut bergerak dari penetapan isu riset, identifikasi corpus ayat-ayat qaul, klasifikasi konteks komunikasi ayat, analisis tafsir, koding tematik nilai etik, kontekstualisasi dengan problem polarisasi sosial, hingga penyusunan sintesis konseptual etika komunikasi Qur'ani. Alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Analisis Tafsir Tematik-Kontekstual Ayat-Ayat Qaul

Bagan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada inventarisasi ayat-ayat qaul, tetapi bergerak menuju analisis tematik-kontekstual. Dengan demikian, ayat-ayat qaul tidak hanya dipahami sebagai tuntunan moral individual dalam berbicara, melainkan sebagai prinsip etika komunikasi sosial yang dapat dikontekstualisasikan dengan problem polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan krisis adab komunikasi di ruang publik kontemporer.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis kepustakaan. Artinya, penelitian tidak mengukur secara empiris perilaku komunikasi pengguna media sosial, tidak menguji efektivitas etika komunikasi Qur'ani melalui survei atau eksperimen, dan tidak meneliti resepsi publik terhadap ayat-ayat *qaul*. Kontribusi artikel berada pada level konseptual-eksplanatoris: merumuskan secara sistematis bagaimana Al-Qur'an membangun etika komunikasi dan bagaimana etika itu dapat dibaca sebagai kerangka mitigasi polarisasi sosial. Keterbatasan ini sekaligus menjadi penanda ruang bagi penelitian berikutnya yang dapat mengembangkan desain ini ke arah *living Qur'an*, analisis wacana digital, atau studi resepsi.

Hasil dan Diskusi

Prinsip Etika Komunikasi dalam Ayat-Ayat Qaul

Dalam Al-Qur'an, akar kata *q-w-l* menempati posisi yang sangat sentral. *Quranic Arabic Corpus* mencatat bahwa akar ini muncul 1.722 kali dalam enam bentuk derivatif, dengan 92 kemunculan sebagai bentuk nomina *qawl* (*The Quranic Arabic Corpus*, 2025). Data ini penting bukan sekadar sebagai statistik leksikal, melainkan sebagai petunjuk bahwa “ucapan”, “pernyataan”, dan “tuturan” merupakan medan moral yang sangat diperhatikan Al-Qur'an. Sejumlah studi kontemporer tentang komunikasi Islam juga membaca bentuk-bentuk *qaulan* sebagai fondasi etik komunikasi Qur'ani yang dapat diterapkan dalam dakwah, pendidikan, dan layanan sosial-profesional.

Secara semantik, *qawl* menunjuk pada ujaran atau pernyataan; namun Al-Qur'an tidak berhenti pada pengertian netral itu. Al-Qur'an memberi kualifikasi normatif pada tuturan melalui sejumlah formula seperti *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan balighan*, *qaulan kariman*, *qaulan maysuran*, dan *qaulan layyinan*. Karena itu, ucapan dalam Al-Qur'an bukan hanya saluran penyampaian informasi, tetapi juga tindakan etis yang dinilai

dari mutu kebenarannya, kepantasannya, daya-jangkaunya, dampaknya terhadap lawan bicara, serta kemampuannya menjaga kehormatan manusia. Pembacaan ini sejalan dengan kecenderungan kajian komunikasi Islam yang melihat istilah-istilah qaulan sebagai unit etika komunikatif, bukan sekadar variasi gaya bahasa.

Pada titik inilah penting ditegaskan bahwa sub-bab ini tidak membaca istilah qaul secara parsial. Yang dibaca bukan hanya arti kata per kata, melainkan arsitektur etika komunikasi yang dibangun Al-Qur'an melalui pemilihan sifat-sifat yang melekat pada ujaran itu. Dengan kata lain, Al-Qur'an mengajarkan bahwa kualitas moral seseorang tidak hanya tampak pada apa yang diucapkan, tetapi juga bagaimana, kepada siapa, dalam suasana apa, dan dengan akibat apa ucapan itu disampaikan.

Ayat-ayat qaulan menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai tindakan yang multidimensional. Pada satu sisi, Al-Qur'an mengatur isi komunikasi, misalnya melalui perintah berkata benar dalam QS. al-Nisa': 9 dan QS. al-Ahzab : 70. Pada sisi lain, Al-Qur'an juga mengatur cara berbicara, misalnya dengan larangan berkata secara menggoda dalam QS. al-Ahzab : 32 dan perintah berkata lembut dalam QS. Taha : 44. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an memperhatikan tujuan dan dampak komunikasi, seperti dalam QS. al-Nisa': 63 yang memerintahkan qaulan balighan agar nasihat mencapai batin pendengar, serta QS. al-Isra' : 23 yang mengaitkan tutur kata mulia dengan perlindungan martabat orang tua (RI, 2019).

Pembacaan klasik memperkuat kesimpulan tersebut. Dalam tafsir al-Qurthubi atas QS. al-Nisa': 63, qaulan balighan dijelaskan sebagai ucapan yang bersifat paling kuat dalam menegur dan disampaikan di ruang yang menyentuh batin pendengar. Dalam QS. al-Ahzab: 32, al-Qurthubi menegaskan bahwa larangan "melembutkan suara" di sana bukan larangan atas kelembutan etis secara umum, melainkan larangan atas gaya bicara yang menimbulkan relasi tidak sehat di hati pendengar; sebagai gantinya,

Al-Qur'an memerintahkan qaulan ma'rufan, yakni tutur yang diakui baik oleh syariat dan jiwa yang sehat.

Sementara itu, pada QS. al-Isra': 28, al-Tabari dan Ibn Kathir menerangkan bahwa qaulan maysuran ialah ucapan yang tetap lembut dan menjanjikan kebaikan ketika seseorang belum mampu memberi bantuan material. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak memahami bahasa secara sempit sebagai transfer data, melainkan sebagai tindakan sosial yang dapat menyembuhkan, merusak, mendidik, menenangkan, atau melukai (Al-Tabari, 1994a; Kathir, n.d.-a).

Karena itu, etika komunikasi Qur'ani tidak dapat direduksi menjadi anjuran "berbicara baik" secara umum. Ia adalah sistem yang menyatukan kebenaran proposisional, kepantasan sosial, ketepatan sasaran, pemuliaan martabat, kelembutan, dan harapan. Dalam istilah yang lebih metodologis, ayat-ayat qaulan menunjukkan bahwa Al-Qur'an merancang komunikasi sebagai perjumpaan antara pesan, relasi, konteks, dan tujuan moral.

Formula qaulan sadidan muncul, antara lain, dalam QS. al-Nisa': 9 dan QS. al-Ahzab: 70. Pada QS. al-Nisa': 9, al-Tabari menempatkan ayat ini dalam konteks orang-orang yang hadir ketika seseorang akan berwasiat. Mereka diperintahkan bertakwa dan mengarahkan pewasiat kepada keputusan yang tidak menzalimi ahli waris yang lemah (Al-Tabari, 1994e). Di sini, qaulan sadidan bukan sekadar "kata yang benar" dalam arti abstrak, tetapi ujaran yang meluruskan keputusan, mencegah kerusakan, dan bertanggung jawab terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebenaran dalam Al-Qur'an sejak awal terkait dengan tanggung jawab sosial, bukan semata akurasi logis.

Makna itu diperluas dalam QS. al-Ahzab: 70. Al-Tabari menafsirkan *qaulan sadidan* sebagai perkataan yang *qāsid*, *haqq*, dan *ghayr bāṭil* terarah, benar, dan bukan kebatilan (Al-Tabari, 1994b). Ibn Kathir menambahkan bahwa ia adalah perkataan yang lurus, tidak bengkok, dan tidak menyimpang. Al-Qurthubi juga merangkum maknanya sebagai tutur yang tepat dan benar, bahkan mengaitkannya dengan ketulusan lahir-batin.

Yang menarik, ayat berikutnya, QS. al-Ahzab: 71, menghubungkan *qawli sadid* dengan perbaikan amal dan pengampunan dosa, sehingga tutur yang benar dalam Al-Qur'an bukan perkara pinggiran, melainkan bagian dari disiplin takwa yang membentuk keseluruhan kehidupan etis (Al-Qurthubi, 2005d).

Dari dua konteks itu dapat ditarik satu prinsip penting bahwa *qaulan sadidan* adalah dasar etik komunikasi Qur'ani karena ia menggabungkan empat unsur sekaligus, yaitu kejujuran, ketepatan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam horizon kekinian, prinsip ini sangat relevan ketika komunikasi publik dipenuhi distorsi, potongan informasi yang menyesatkan, atau ujaran yang benar secara literal tetapi manipulatif secara maksud. Secara Qur'ani, ujaran baru disebut *sadid* bila ia lurus secara makna, benar secara substansi, dan membawa orientasi perbaikan. Pembacaan seperti ini juga sejalan dengan sejumlah studi kontemporer yang menempatkan *qaulan sadidan* sebagai inti komunikasi Islam yang jujur dan anti-manipulasi.

Jika *sadid* menandai sumbu kebenaran, maka *ma'ruf* menandai sumbu kepantasan normatif. Formula *qaulan ma'rufan* tersebar pada beberapa ayat dengan konteks yang berbeda-beda: QS. al-Nisa': 5, QS. al-Nisa': 8, QS. al-Baqarah: 235, dan QS. al-Ahzab: 32. Di QS. al-Nisa': 5, al-Tabari menafsirkan *qaulan ma'rufan* sebagai janji yang baik dan ucapan yang membimbing orang yang belum cakap agar kelak menerima hartanya ketika telah *rusyd* (Al-Tabari, 1994c). Ibn Kathir merangkum dimensinya sebagai birr, silah, kalam yang baik, dan perbaikan akhlak. Ini menunjukkan bahwa *ma'ruf* bukan kata manis yang kosong, tetapi tutur yang mendidik, menenangkan, dan menjaga hak orang lain secara bertahap (Kathir, n.d.-c).

Dalam QS. al-Nisa': 8, istilah yang sama muncul pada konteks pembagian harta dan kehadiran kerabat, yatim, serta orang miskin. Al-Tabari menunjukkan bahwa ayat ini diarahkan agar mereka tidak dipinggirkan secara emosional meski tidak selalu menjadi pihak penerima utama; bahkan ketika tidak ada bagian yang signifikan untuk diberikan,

tetap ada kewajiban mengucapkan kata yang patut (Al-Tabari, 1994d). Artinya, Al-Qur'an tidak membenarkan prosedur yang sah secara hukum tetapi kasar secara sosial. Ada pengakuan yang jelas bahwa distribusi materi harus disertai distribusi penghormatan melalui bahasa.

Dalam QS. al-Baqarah: 235, *qaulan ma'rufan* berada dalam pengaturan etika komunikasi kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Tafsir Ibn Kathir, al-Tabari, al-Baghawi, dan al-Qurthubi sama-sama menunjukkan bahwa yang dibolehkan adalah *ta'ridh* yang patut bukan janji rahasia, bukan pernyataan erotik, dan bukan langkah yang melanggar batas hukum. Jadi, *ma'ruf* di sini menandai ucapan yang sah, wajar, terkendali, dan tidak mengeksploitasi situasi rentan. Dengan demikian, kepantasan Qur'ani tidak bisa dipisahkan dari dimensi legal dan moral sekaligus.

Konteks paling tajam justru tampak dalam QS. al-Ahzab: 32. Al-Qurthubi menafsirkan larangan "janganlah kamu tunduk/ melembutkan dalam berbicara" sebagai larangan atas gaya tutur yang memancing penyakit hati, lalu menegaskan bahwa *qaulan ma'rufan* ialah ucapan yang benar dan tidak ditolak oleh syariat maupun jiwa yang sehat (Al-Qurthubi, 2005c). Al-Tabari juga menjelaskan bahwa *qaulan ma'rufan* adalah ujaran yang telah diizinkan Allah dan termasuk kategori baik dalam kebaikan (Al-Tabari, 1994b). Dengan demikian, *ma'ruf* dalam komunikasi Qur'ani bukan sekadar sopan santun formal, tetapi kepantasan yang menjaga batas, menutup pintu fitnah, dan melindungi relasi sosial dari ambiguitas yang merusak.

Dari keseluruhan ayat itu, *qaulan ma'rufan* dapat dirumuskan sebagai prinsip komunikasi beradab: benar saja belum cukup; sebuah ujaran juga harus patut, aman secara sosial, sesuai konteks, dan diakui baik oleh norma syar'i serta nurani sosial. Karena itu, jika *qaulan sadidan* menertibkan komunikasi dari dalam, yaitu dari sisi kebenaran substansi, maka *qaulan ma'rufan* menertibkan komunikasi dari luar, yaitu dari sisi kesesuaian relasional dan kepantasan sosialnya.

Formula *qaulan balighan* dalam QS. al-Nisa': 63 menambahkan dimensi yang belum selesai ditangkap oleh kategori *sadid* dan *ma'ruf*. Pada ayat ini, Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan nasihat, tetapi nasihat yang baligh, yakni yang sampai ke sasaran batin. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa maksudnya adalah teguran yang sangat kuat dan disampaikan pada ruang yang menyentuh kedalaman diri pendengar; kata baligh sendiri, menurut penjelasan yang ia bawa, menunjuk pada kemampuan ujaran untuk mencapai apa yang dituju oleh pembicara (Al-Qurthubi, 2005b). Karena itu, *qaulan balighan* dapat dibaca sebagai prinsip efektivitas etis: pesan yang benar dan patut tetap harus disampaikan dengan ketepatan bentuk agar benar-benar menggerakkan kesadaran moral.

Dengan demikian, Al-Qur'an tampak tidak mengidealkan komunikasi yang secara isi benar tetapi gagal menyentuh pendengar. Dalam kerangka Qur'ani, komunikasi yang baik bukan hanya valid dan proper, melainkan juga transformatif. Ia harus mampu menembus apatisme, kemunafikan, atau penolakan batin. Pembacaan ini penting karena memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi dalam Al-Qur'an bukan teknik persuasi yang netral, melainkan bagian dari amanat moral untuk menghadirkan kebaikan secara nyata dalam jiwa dan perilaku sosial.

Sementara itu, formula *qaulan kariman* pada QS. al-Isra': 23 membawa etika bahasa ke tingkat pemuliaan martabat. Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini bukan hanya melarang cacian dan hardikan kepada orang tua, tetapi bahkan menolak bentuk kejengkelan paling minimal seperti "uff". Dalam penjelasannya, *qaulan kariman* adalah ucapan yang lunak, halus, dan "selamat dari setiap cacat", bahkan dicontohkan dengan panggilan penuh hormat seperti *yā abatāh* dan *yā ummāh* (Al-Qurthubi, 2005a). Ibn al-Musayyib, sebagaimana dikutip al-Qurthubi, menggambarkan seperti tutur seorang hamba yang bersalah di hadapan tuan yang keras; gambaran ini menekankan kehormatan, kerendahan hati, dan penjagaan adab.

Di sini tampak bahwa etika komunikasi Qur'ani tidak berhenti pada larangan menyakiti, tetapi meningkat menjadi kewajiban memuliakan. Bahasa bukan hanya harus bebas dari bohong dan kekasaran, melainkan juga harus aktif menyatakan pengakuan atas martabat pihak lain. Karena itu, *qaulan kariman* paling tepat dipahami sebagai prinsip *dignifying communication*: tutur kata yang mengafirmasi kehormatan manusia dan menolak dehumanisasi.

Prinsip yang berdekatan, tetapi tidak identik, tampak pada *qaulan maysuran* dalam QS. al-Isra': 28. Ayat ini secara khusus mengatur situasi ketika seseorang tidak mampu memberi bantuan material kepada kerabat atau orang yang meminta. Al-Tabari menjelaskan bahwa *qaulan maysuran* adalah janji yang baik, kata-kata yang indah, kelembutan, dan *rifq* (Al-Tabari, 1994a). Ibn Kathir juga memahami frasa ini sebagai ucapan yang lembut dan memudahkan, berupa janji kebaikan ketika rezeki datang (Kathir, n.d.-a). Dengan kata lain, bahkan dalam penolakan atau ketidakmampuan, Al-Qur'an tetap menuntut adanya bahasa yang menjaga harapan dan tidak menambah luka sosial.

Karena itu, *qaulan maysuran* bukan sinonim sederhana dari "kata-kata mudah". Dalam konteks tafsir, ia lebih tepat dipahami sebagai komunikasi yang menenangkan, tidak menghinakan, dan tetap membuka ruang harapan. Hal ini sangat penting secara etis: seseorang mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi ia tetap tidak dibenarkan memperlakukan orang itu dengan bahasa yang mempermalukan. Di sinilah Al-Qur'an mempertautkan etika komunikasi dengan sensitivitas sosial terhadap kerentanan.

Adapun *qaulan layyinan* pada QS. Taha: 44 menampilkan bentuk paling kuat dari etika kelembutan Qur'ani. Ayat ini memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara lembut kepada fir'aun sosok yang dalam narasi Qur'ani mewakili puncak arogansi dan kekuasaan represif. Ibn Kathir menyebut ayat ini sebagai *'ibrah 'azhīmah*: jika kepada fir'aun saja Allah memerintahkan kelembutan dan pelunakan tutur, maka terlebih lagi

kepada pihak-pihak lain (Kathir, n.d.-b). Penjelasan yang dikutip Ibn Kathir menunjukkan bahwa *qaulan layyinan* mencakup bahasa yang tidak membangkitkan kemarahan dan tidak membuat orang lari dari kebenaran.

Karena itu, kelembutan di sini bukan tanda kelemahan argumentatif, melainkan strategi etis agar kebenaran tetap mungkin diterima. QS. Taha: 44 sendiri menutup perintah itu dengan tujuan: *la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha* mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi, *qaulan layyinan* memperlihatkan bahwa kelembutan adalah bagian dari rasionalitas dakwah dan etika dialog. Tutur kata yang keras belum tentu paling kuat; justru dalam perspektif Qur'ani, kelembutan sering menjadi medium yang lebih berdaya ubah.

Jika keenam formula itu dibaca secara terpadu, maka Al-Qur'an membangun etika komunikasi yang berpijak pada enam nilai utama: kebenaran dalam *qaulan sadidan*; kepantasan dan keterterimaan moral-sosial dalam *qaulan ma'rufan*; efektivitas transformatif dalam *qaulan balighan*; pemuliaan martabat dalam *qaulan kariman*; kemudahan dan pemeliharaan harapan dalam *qaulan maysuran*; serta kelembutan dialogis dalam *qaulan layyinan*. Sintesis ini juga konsisten dengan kecenderungan kajian kontemporer yang membaca istilah-istilah *qaulan* sebagai prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam, meskipun artikel ini menempatkannya secara lebih ketat dalam horizon tafsir tematik dan etika sosial.

Ringkasan sintesis tersebut dapat dilihat pada pemetaan berikut, yang disusun dari pembacaan ayat-ayat corpus dan tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, serta al-Qurthubi.

Tabel 2. Sintesis Pembacaan Ayat-ayat Qaul

Formulasi Qaulan	Lokasi Ayat Utama	Prinsip Etika Inti	Orientasi Komunikatif
<i>Qaulan sadidan</i>	QS. al-Nisa' [4]: 9; QS. al-Ahzab [33]: 70	Kebenaran, kelurusan, keadilan, tanggung jawab	Ujaran harus benar dan tidak menyesatkan
<i>Qaulan ma'rufan</i>	QS. al-Nisa' [4]: 5, 8; QS. al-Baqarah	Kepantasan, kepatutan, keamanan sosial	Ujaran harus patut, legal, dan tidak

	[2]: 235; QS. al-Ahzab [33]: 32		memicu kerusakan relasi
<i>Qaulan balighan</i>	QS. al-Nisa' [4]: 63	Ketepatan sasaran, daya sentuh, efektivitas	Ujaran harus mencapai batin dan menimbulkan kesadaran
<i>Qaulan kariman</i>	QS. al-Isra' [17]: 23	Penghormatan, pemuliaan, anti-dehumanisasi	Ujaran harus menjaga martabat lawan bicara
<i>Qaulan maysuran</i>	QS. al-Isra' [17]: 28	Kemudahan, ketenangan, harapan	Bahkan saat menolak, bahasa harus tetap lembut dan memberi harapan
<i>Qaulan layyinan</i>	QS. Taha [20]: 44	Kelembutan, persuasi, dialog	Kebenaran disampaikan tanpa kekerasan verbal

Al-Qur'an membangun prinsip etika komunikasi melalui ayat-ayat *qaul* dengan cara mengkualifikasi ujaran secara moral, sosial, dan relasional. Ucapan yang baik menurut Al-Qur'an bukan hanya yang "berisi pesan benar", tetapi yang sekaligus tepat, patut, menjangkau batin, memuliakan manusia, memberi harapan, dan membuka ruang dialog.

Kontekstualisasi Prinsip *Qaul* dalam Menghadapi Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial dapat dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat mengalami keterbelahan tajam akibat perbedaan identitas, kepentingan, ideologi, afiliasi politik, agama, etnis, kelas sosial, atau orientasi kelompok tertentu. Dalam keadaan yang wajar, perbedaan merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan berubah menjadi polarisasi ketika identitas kelompok ditempatkan secara antagonistik: "kami" dipandang benar, bermoral, dan layak dipercaya, sedangkan "mereka" dipersepsikan salah, berbahaya, dan patut dicurigai. Sehingga polarisasi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pandangan, tetapi juga dengan pengerasan sikap, penyempitan ruang dialog, melemahnya empati, serta meningkatnya kecenderungan untuk menilai pihak lain berdasarkan prasangka kelompok.

Dalam kajian sosial-politik kontemporer, polarisasi sering dijelaskan sebagai proses ketika pembelahan sosial tertentu menjadi begitu dominan sehingga menutupi kemungkinan kerja sama lintas kelompok. McCoy, Rahman, dan Somer menyebut polarisasi yang merusak sebagai kondisi ketika masyarakat terbagi ke dalam kubu-kubu yang saling menegasikan sehingga kompromi, kepercayaan, dan penghormatan terhadap pihak lain semakin melemah (McCoy et al., 2018). Hal yang sama juga tampak dalam konsep *affective polarization*, yaitu keterbelahan yang tidak hanya berakar pada perbedaan pendapat, tetapi juga pada sentimen emosional negatif terhadap kelompok lawan (Iyengar et al., 2012). Dalam konteks ini, polarisasi sosial bukan semata-mata masalah politik atau identitas, tetapi juga krisis etika komunikasi. Masyarakat yang terpolarisasi cenderung tidak lagi berkomunikasi untuk mencari kebenaran bersama, melainkan untuk membenarkan kelompok sendiri, menyerang lawan, dan memperkuat batas psikologis antara “*in-group*” dan “*out-group*”.

Krisis tersebut semakin kompleks dalam ruang komunikasi digital. Media sosial mempercepat sirkulasi informasi, tetapi pada saat yang sama juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, penghinaan, dan propaganda identitas. Wardle dan Derakhshan menjelaskan bahwa gangguan informasi (*information disorder*) tidak hanya berupa informasi salah, tetapi juga mencakup informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan, merusak reputasi, atau menciptakan konflik sosial (Wardle & Derakhshan, 2017). Vosoughi, Roy, dan Aral bahkan menunjukkan bahwa berita palsu dapat menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam dibandingkan berita benar, terutama karena unsur kebaruan, sensasi, dan daya provokatifnya (Vosoughi et al., 2018). Dalam masyarakat yang telah terpolarisasi, informasi semacam ini mudah diterima bukan karena validitas faktualnya, tetapi karena sesuai dengan prasangka, emosi, dan kepentingan kelompok penerimanya.

Di titik inilah prinsip-prinsip *qaul* dalam Al-Qur'an memperoleh relevansi kontekstual. Ayat-ayat *qaul* tidak hanya mengajarkan adab

personal dalam berbicara, tetapi juga menyediakan kerangka etik bagi komunikasi sosial. Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai tindakan moral yang memiliki konsekuensi sosial. Ucapan bukan sekadar ekspresi lisan, melainkan dapat menjadi sarana membangun kebenaran, menjaga martabat, merawat harmoni, atau sebaliknya menjadi alat perusakan sosial. Karena itu, prinsip *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan*, *qaulan kariman*, *qaulan balighan*, dan *qaulan maysuran* dapat dibaca sebagai respons normatif terhadap problem komunikasi yang memperkuat polarisasi sosial.

Pertama, *qaulan sadidan* menjadi prinsip utama dalam menghadapi hoaks, disinformasi, fitnah, dan manipulasi fakta. Istilah *sadid* mengandung makna lurus, benar, tepat, dan tidak menyimpang. Dalam QS. al-Ahzab [33]: 70, perintah bertakwa kepada Allah diikuti dengan perintah mengucapkan perkataan yang benar. Keterkaitan antara takwa dan kebenaran ucapan menunjukkan bahwa komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an bukan tindakan netral, melainkan bagian dari tanggung jawab religius dan moral. Al-Tabari menjelaskan bahwa *qaulan sadidan* merujuk pada ucapan yang benar dan sesuai dengan kebenaran, sedangkan Ibn Kathir mengaitkannya dengan perkataan yang lurus, jujur, dan tidak menyimpang dari petunjuk Allah. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa *sadid* bukan hanya benar secara substansi, tetapi juga tepat sasaran, tepat cara, dan membawa kemaslahatan (Shihab, 2022).

Dalam konteks polarisasi sosial, *qaulan sadidan* menolak semua bentuk komunikasi yang mengorbankan kebenaran demi kemenangan kelompok. Hoaks dan disinformasi sering kali bekerja dengan cara memelintir fakta, mengambil potongan informasi di luar konteks, atau menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi. Praktik semacam ini memperkuat prasangka dan memperlebar jarak sosial. Prinsip *qaulan sadidan* menuntut agar komunikasi publik dibangun di atas akurasi, verifikasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap informasi yang disampaikan dalam ruang sosial harus melewati pertimbangan etis: apakah informasi

tersebut benar, apakah sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, apakah cara penyampaianya tidak menyesatkan, dan apakah dampaknya tidak merusak kehidupan bersama. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer terhadap literasi informasi, pemeriksaan fakta, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab.

Kedua, *qaulan ma'rufan* relevan untuk menghadapi ujaran kasar, provokasi, dan komunikasi yang merusak norma sosial. Kata *ma'ruf* merujuk pada sesuatu yang dikenal baik, pantas, diterima oleh nilai moral, dan selaras dengan kepatutan sosial. Dalam beberapa ayat, seperti QS. al-Baqarah [2]: 235, QS. al-Nisa' [4]: 5, dan QS. al-Ahzab [33]: 32, Al-Qur'an menggunakan istilah *qaulan ma'rufan* untuk menekankan pentingnya ucapan yang baik, pantas, dan tidak menimbulkan kerusakan moral. Al-Qurthubi memahami *ma'ruf* sebagai ucapan yang tidak mengandung kekejian, kekasaran, atau hal yang merendahkan (Al-Qurthubi, 2006). Sementara itu, Tafsir Kementerian Agama RI menekankan bahwa perkataan yang *ma'ruf* adalah perkataan yang baik menurut tuntunan agama dan kepatutan masyarakat (RI, 2019).

Dalam masyarakat terpolarisasi, problem komunikasi tidak selalu berbentuk kebohongan. Ada kalanya informasi yang disampaikan benar, tetapi dikemas dengan bahasa kasar, sinis, provokatif, atau merendahkan. Komunikasi seperti ini tetap bermasalah karena dapat memperkeruh konflik dan memicu reaksi defensif dari pihak lain. *Qaulan ma'rufan* mengingatkan bahwa kebenaran tidak boleh dipisahkan dari kepantasan etik. Komunikasi yang baik bukan hanya benar secara isi, tetapi juga patut secara bahasa, situasi, dan dampak sosial. Oleh karena itu, kritik sosial, perbedaan pendapat, dan koreksi terhadap kesalahan tetap harus disampaikan dengan bahasa yang menjaga martabat dan tidak memperluas permusuhan. Prinsip ini penting dalam membangun budaya diskusi publik yang sehat, sebab masyarakat tidak mungkin keluar dari polarisasi jika komunikasi terus dipenuhi hinaan, sindiran destruktif, dan provokasi emosional.

Ketiga, *qaulan layyinan* memberikan landasan etik bagi komunikasi dialogis dalam menghadapi sikap antagonistik dan agresif. Prinsip ini terdapat dalam QS. Taha [20]: 44 ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Konteks ayat ini sangat penting karena Fir'aun bukan sekadar lawan biasa, melainkan simbol kekuasaan represif dan kesombongan politik. Namun, Al-Qur'an tetap memerintahkan pendekatan komunikasi yang lembut. Ibn Kathir menjelaskan bahwa kelembutan dalam ayat ini dimaksudkan agar pesan lebih mudah diterima dan membuka kemungkinan kesadaran (Kathir, 1999). Al-Maraghi juga menekankan bahwa kelembutan ucapan dapat melemahkan resistensi psikologis lawan bicara dan membuka ruang bagi nasihat (al-Maraghi, 1993).

Dalam konteks polarisasi sosial, *qaulan layyinan* menolak pola komunikasi yang mempermalukan, menyerang, atau menundukkan lawan bicara. Polarisasi sering diperkuat oleh gaya komunikasi yang agresif: debat yang bertujuan mengalahkan, bukan memahami; kritik yang dirancang untuk mempermalukan, bukan memperbaiki; dan percakapan yang diarahkan untuk memperkuat permusuhan, bukan mencari titik temu. Prinsip *qaulan layyinan* menawarkan pendekatan sebaliknya, yaitu komunikasi persuasif yang tetap tegas secara nilai tetapi lembut secara cara. Kelembutan tidak berarti kompromi terhadap kebatilan, melainkan strategi moral untuk menjaga kemungkinan dialog. Dalam masyarakat yang terbelah, komunikasi lembut dapat menjadi jembatan awal untuk menurunkan ketegangan, membangun kepercayaan, dan membuka ruang rekonsiliasi.

Keempat, *qaulan kariman* menjadi prinsip penting untuk menghadapi dehumanisasi, penghinaan kelompok, dan pelabelan negatif. Istilah ini terdapat dalam QS. al-Isra' [17]: 23 dalam konteks perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara tekstual, ayat ini berbicara tentang komunikasi anak kepada orang tua, tetapi secara etik mengandung prinsip yang lebih luas, yaitu kewajiban menjaga kemuliaan manusia melalui

bahasa. Kata *karim* menunjukkan kemuliaan, penghormatan, dan penghargaan terhadap martabat. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *qaulan kariman* adalah ucapan yang lembut, indah, dan menunjukkan penghormatan. Quraish Shihab menafsirkan prinsip ini sebagai ucapan yang tidak hanya bebas dari kekasaran, tetapi juga mengandung penghargaan terhadap kedudukan pihak yang diajak bicara (Shihab, 2022).

Dalam polarisasi sosial, salah satu gejala paling berbahaya adalah dehumanisasi, yaitu ketika kelompok lain tidak lagi dilihat sebagai manusia yang bermartabat, melainkan sebagai musuh, ancaman, atau objek kebencian. Dehumanisasi sering muncul melalui label negatif, stereotip, ejekan identitas, atau generalisasi yang merendahkan kelompok tertentu. Waldron menjelaskan bahwa ujaran kebencian merusak martabat sosial karena mengirim pesan bahwa kelompok tertentu tidak layak diterima sebagai anggota masyarakat yang setara (Waldron, 2012). Dalam perspektif Qur'ani, praktik semacam ini bertentangan dengan *qaulan kariman*. Perbedaan pandangan tidak boleh menghapus kewajiban untuk memuliakan manusia. Bahkan ketika kritik harus disampaikan, bahasa yang digunakan tidak boleh mencabut martabat pihak lain.

Kelima, *qaulan balighan* relevan untuk menjawab kegagalan komunikasi moral di ruang publik. Prinsip ini terdapat dalam QS. al-Nisa' [4]: 63, ketika Al-Qur'an memerintahkan agar nasihat disampaikan dengan perkataan yang membekas pada jiwa. Kata *baligh* mengandung makna sampai, efektif, mendalam, dan mampu mencapai sasaran. Al-Tabari memahami *qaulan balighan* sebagai perkataan yang memberi pengaruh dan menyentuh hati (Al-Tabari, 2001). Al-Maraghi menekankan bahwa komunikasi yang *baligh* adalah komunikasi yang sesuai dengan kondisi psikologis audiens sehingga pesan moral dapat diterima secara lebih efektif (al-Maraghi, 1993).

Dalam konteks polarisasi, banyak pesan kebaikan gagal bekerja bukan karena substansinya salah, tetapi karena tidak disampaikan secara kontekstual. Pesan moral yang terlalu menggurui, tidak memahami emosi

publik, atau tidak sensitif terhadap pengalaman kelompok tertentu sering kali tidak menghasilkan perubahan. Karena itu, *qaulan balighan* menuntut efektivitas komunikasi: pesan harus benar, tetapi juga harus disampaikan dengan bahasa yang dipahami, argumentasi yang relevan, dan pendekatan yang menyentuh kesadaran. Prinsip ini penting bagi tokoh agama, pendidik, pemimpin masyarakat, dan komunikator publik agar tidak hanya menyampaikan norma secara formal, tetapi juga mampu menjembatani norma tersebut dengan realitas sosial audiens. Dalam masyarakat terpolarisasi, komunikasi yang *baligh* dapat membantu mengubah percakapan dari sekadar saling menyerang menjadi refleksi moral bersama.

Keenam, *qaulan maysuran* dapat dikaitkan dengan komunikasi inklusif terhadap kelompok rentan, minoritas sosial, atau pihak yang berada dalam posisi lemah. Prinsip ini terdapat dalam QS. al-Isra' [17]: 28, ketika seseorang belum mampu memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin, atau musafir, maka ia tetap diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang mudah dan menyenangkan. Kata *maysur* mengandung makna mudah, ringan, pantas, dan memberi harapan. Dalam Tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini dipahami sebagai tuntunan agar penolakan atau ketidakmampuan membantu tetap disampaikan dengan cara yang baik, tidak menyakitkan, dan tidak memutus harapan (RI, 2019).

Dalam konteks polarisasi sosial, kelompok rentan sering menjadi korban ganda: mereka menghadapi ketimpangan sosial sekaligus mengalami kekerasan simbolik melalui bahasa. Komunikasi yang eksklusif, merendahkan, atau menyalahkan korban dapat menimbulkan luka sosial baru. *Qaulan maysuran* mengajarkan bahwa komunikasi harus mempertimbangkan kondisi pihak yang lemah. Ketika perbedaan sosial, ekonomi, agama, atau politik tidak dapat segera diselesaikan, bahasa yang digunakan tetap harus memberi ruang harapan, bukan memperdalam keterasingan. Prinsip ini memperluas etika komunikasi Qur'ani dari sekadar

benar dan santun menuju komunikasi yang empatik, inklusif, dan berpihak pada pemulihan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip-prinsip *qaul* dalam Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan sebagai kerangka etik untuk menghadapi krisis komunikasi yang memperkuat polarisasi sosial. *Qaulan sadidan* menegakkan kebenaran dan akurasi informasi; *qaulan ma'rufan* menjaga kepantasan dan norma sosial; *qaulan layyinan* membuka ruang dialog persuasif; *qaulan kariman* melindungi martabat manusia; *qaulan balighan* memastikan efektivitas pesan moral; dan *qaulan maysuran* menghadirkan komunikasi yang inklusif dan tidak melukai kelompok rentan. Keenam prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur etika berbicara pada level individual, tetapi juga menawarkan prinsip komunikasi sosial yang berorientasi pada rekonsiliasi, penghormatan, dan pemeliharaan kohesi masyarakat.

Tabel 1. Kontekstualisasi Prinsip *Qaul* dalam Menghadapi Polarisasi Sosial

Prinsip <i>Qaul</i>	Dasar Ayat	Makna Etik	Problem Komunikasi Kontemporer	Kontribusi terhadap Penyelesaian Polarisasi
<i>Qaulan sadidan</i>	QS. al-Ahzab [33]: 70; QS. al-Nisa' [4]: 9	Ucapan benar, lurus, akurat, dan bertanggung jawab	Hoaks, disinformasi, fitnah, manipulasi fakta	Menegakkan komunikasi berbasis verifikasi, kejujuran, dan tanggung jawab moral
<i>Qaulan ma'rufan</i>	QS. al-Baqarah [2]: 235; QS. al-Nisa' [4]: 5; QS. al-Ahzab [33]: 32	Ucapan pantas, santun, dan sesuai norma moral	Ujaran kasar, provokasi, komunikasi destruktif	Menjaga kepantasan bahasa agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan
<i>Qaulan layyinan</i>	QS. Taha [20]: 44	Ucapan lembut, dialogis, dan persuasif	Komunikasi agresif, antagonistik, saling mempermalukan	Membuka ruang dialog dan menurunkan resistensi psikologis antar-kelompok

<i>Qaulan kariman</i>	QS. al-Isra' [17]: 23	Ucapan mulia dan menghormati martabat manusia	Dehumanisasi, penghinaan kelompok, pelabelan negatif	Melindungi martabat manusia meskipun terdapat perbedaan pandangan
<i>Qaulan balighan</i>	QS. al-Nisa' [4]: 63	Ucapan efektif, menyentuh kesadaran, dan tepat sasaran	Kegagalan komunikasi moral di ruang publik	Menghadirkan pesan yang kontekstual, reflektif, dan mampu mendorong perubahan sosial
<i>Qaulan maysuran</i>	QS. al-Isra' [17]: 28	Ucapan mudah, memberi harapan, dan tidak menyakitkan	Eksklusi kelompok rentan, minoritas, atau pihak lemah	Membangun komunikasi inklusif yang mencegah luka sosial baru

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi prinsip *qaul* memperlihatkan bahwa etika komunikasi Qur'ani memiliki daya relevansi yang kuat dalam menghadapi polarisasi sosial kontemporer. Polarisasi tidak dapat diatasi hanya dengan regulasi informasi atau pengendalian platform digital, tetapi juga membutuhkan transformasi etik dalam cara masyarakat berbicara, mendengar, menilai, dan merespons perbedaan. Al-Qur'an memberikan fondasi normatif bahwa komunikasi harus diarahkan untuk menjaga kebenaran, merawat martabat, menghindari kerusakan, dan membuka kemungkinan rekonsiliasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *qaul* dapat diposisikan sebagai etika komunikasi sosial yang tidak hanya bersifat personal-spiritual, tetapi juga memiliki fungsi publik dalam memelihara kohesi masyarakat di tengah keterbelahan sosial.

Konstruksi Etika Komunikasi Qur'ani sebagai Kerangka Mitigasi Polarisasi Sosial

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat *qaul* dan kontekstualisasinya dengan problem polarisasi sosial, etika komunikasi Qur'ani tidak berdiri sebagai kumpulan nasihat moral yang terpisah-pisah. Prinsip *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balighan*, *qaulan kariman*, dan *qaulan maysuran* membentuk satu kerangka etik yang saling melengkapi. Keenam prinsip tersebut bergerak dari dimensi personal menuju dimensi sosial: pada tingkat personal, ia membentuk karakter komunikator yang jujur, santun, lembut, dan bertanggung jawab; sedangkan pada tingkat sosial, ia menjadi kerangka normatif untuk mengurangi disinformasi, agresivitas verbal, dehumanisasi, eksklusi sosial, dan kebuntuan dialog yang memperkuat polarisasi.

Konstruksi etika komunikasi Qur'ani dalam artikel ini dibangun di atas asumsi bahwa polarisasi sosial tidak hanya lahir dari perbedaan kepentingan atau identitas, tetapi juga dari kerusakan cara berkomunikasi. Ketika komunikasi kehilangan orientasi kebenaran, bahasa publik mudah berubah menjadi alat manipulasi. Ketika komunikasi kehilangan kesantunan, perbedaan berubah menjadi penghinaan. Ketika komunikasi kehilangan kelembutan dan penghormatan, pihak lain diposisikan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Dalam situasi seperti itu, etika komunikasi diperlukan bukan hanya untuk memperbaiki gaya berbicara, tetapi untuk membangun kembali syarat-syarat moral bagi kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa polarisasi yang merusak terjadi ketika identitas sosial-politik membelah masyarakat ke dalam kubu antagonistik sehingga kepercayaan, kompromi, dan penghormatan terhadap pihak lain semakin melemah (McCoy et al., 2018; McCoy & Somer, 2019).

Secara konseptual, prinsip-prinsip *qaul* dapat dikonstruksi ke dalam tiga lapis mitigasi polarisasi sosial. Lapis pertama adalah dimensi epistemik, yaitu komunikasi yang menjaga kebenaran, akurasi, dan validitas informasi. Dimensi ini terutama dibangun oleh *qaulan sadidan*. Lapis kedua adalah

dimensi etik-afektif, yaitu komunikasi yang mengatur cara menyampaikan perbedaan agar tidak berubah menjadi penghinaan, kemarahan, atau kebencian. Dimensi ini dibangun oleh *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan*, dan *qaulan kariman*. Lapis ketiga adalah dimensi sosial-rekonsiliatif, yaitu komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memulihkan relasi, menyentuh kesadaran, dan memberi ruang bagi kelompok rentan. Dimensi ini dibangun oleh *qaulan balighan* dan *qaulan maysuran*. Dengan konstruksi ini, etika komunikasi Qur'ani dapat dibaca sebagai kerangka normatif-konseptual yang bekerja secara bertahap: meluruskan informasi, melembutkan relasi, menjaga martabat, dan membuka kemungkinan rekonsiliasi sosial.

Pertama, komunikasi berbasis kebenaran merupakan fondasi dasar kerangka etika komunikasi Qur'ani. Prinsip ini berakar pada *qaulan sadidan*, sebagaimana termuat dalam QS. al-Ahzab [33]: 70 dan QS. al-Nisa' [4]: 9. Dalam tafsir klasik, *qaulan sadidan* dipahami sebagai ucapan yang benar, lurus, adil, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Al-Tabari menjelaskan bahwa *sadid* merujuk pada perkataan yang sesuai dengan kebenaran (Al-Tabari, 2001), sedangkan Ibn Kathir menekankannya sebagai ucapan yang lurus dan tidak mengandung kebatilan (Kathir, 1999). Quraish Shihab memperluas maknanya dengan menekankan bahwa *sadid* tidak hanya benar secara isi, tetapi juga tepat dalam sasaran, cara, dan akibatnya (Shihab, 2022).

Dalam konteks polarisasi sosial, komunikasi berbasis kebenaran menjadi prasyarat untuk melawan hoaks, disinformasi, fitnah, dan manipulasi fakta. Wardle dan Derakhshan membedakan gangguan informasi ke dalam misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, yang masing-masing menunjukkan bahwa kerusakan informasi tidak selalu berupa kebohongan sederhana, tetapi juga dapat berupa informasi benar yang dipelintir untuk tujuan merusak (Wardle & Derakhshan, 2017). Vosoughi, Roy, dan Aral juga menunjukkan bahwa berita palsu dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada berita benar, terutama karena

daya kebaruan dan muatan emosionalnya (Vosoughi et al., 2018). Dalam situasi seperti ini, *qaulan sadidan* menuntut agar komunikasi publik tidak tunduk pada logika viralitas, emosi kelompok, atau kepentingan propaganda. Komunikasi harus dibangun di atas kejujuran, akurasi, validasi informasi, dan tanggung jawab moral.

Kedua, komunikasi beradab menjadi lapis etik yang mengatur cara manusia menyampaikan kebenaran dan perbedaan. Prinsip ini berakar pada *qaulan ma'rufan*, yaitu ucapan yang baik, pantas, santun, dan sesuai dengan nilai moral yang diakui oleh agama maupun kepatutan sosial. Dalam beberapa ayat, seperti QS. al-Baqarah [2]: 235, QS. al-Nisa' [4]: 5, QS. al-Nisa' [4]: 8, dan QS. al-Ahzab [33]: 32, Al-Qur'an menempatkan *qaulan ma'rufan* dalam konteks relasi sosial yang membutuhkan kehati-hatian bahasa. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *ma'ruf* menunjuk pada ucapan yang tidak mengandung kekejian dan tidak melukai (Al-Qurthubi, 2006), sedangkan Tafsir Kementerian Agama RI memahaminya sebagai perkataan yang baik menurut tuntunan agama dan kepantasan masyarakat (RI, 2019).

Komunikasi beradab sangat penting dalam mitigasi polarisasi karena kebenaran yang disampaikan secara kasar dapat berubah menjadi sumber konflik baru. Dalam ruang publik yang terpolarisasi, kritik sering kali tidak lagi diarahkan untuk memperbaiki keadaan, tetapi untuk mempermalukan pihak lain. Bahasa yang sinis, mengejek, dan merendahkan memperkuat jarak psikologis antar-kelompok. Prinsip *qaulan ma'rufan* menegaskan bahwa perbedaan pendapat harus disampaikan dengan cara yang pantas dan tidak merendahkan. Hal ini menjelaskan bahwa komunikasi beradab tidak berarti menghindari kritik, tetapi memastikan bahwa kritik tidak kehilangan orientasi moralnya. Ia menjadi mekanisme etik untuk menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi kebencian.

Ketiga, komunikasi dialogis menjadi prinsip yang mengubah konflik dari arena pertarungan menjadi ruang pertemuan. Prinsip ini berakar pada *qaulan layyinan*, sebagaimana diperintahkan Allah kepada Musa dan Harun

ketika menghadapi Fir'aun dalam QS. Taha [20]: 44. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa kelembutan bukan hanya berlaku dalam komunikasi dengan pihak yang dekat atau sejalan, tetapi justru ditekankan ketika berhadapan dengan pihak yang keras, berkuasa, dan menolak kebenaran. Ibn Kathir menafsirkan *qaulan layyin* sebagai perkataan yang lembut agar lebih mudah diterima (Kathir, 1999), sedangkan al-Maraghi menjelaskan bahwa kelembutan dalam komunikasi dapat membuka kemungkinan kesadaran dan mengurangi resistensi lawan bicara (al-Maraghi, 1993).

Dalam masyarakat yang terpolarisasi, komunikasi sering kali dibangun di atas pola antagonistik: pihak lain dilihat sebagai musuh, bukan mitra dialog. Akibatnya, percakapan publik berubah menjadi kompetisi untuk menang, bukan upaya untuk memahami. Prinsip *qaulan layyin* menawarkan orientasi berbeda. Konflik tidak boleh dikelola dengan kekerasan verbal, tetapi dengan kelembutan, persuasi, dan keterbukaan dialog. Dalam teori komunikasi, dialog yang sehat mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan pihak lain sebagai subjek yang layak didengar, bukan objek yang harus dikalahkan. Etika dialogis semacam ini sejalan dengan gagasan tindakan komunikatif yang menekankan rasionalitas, saling pengertian, dan orientasi pada kesepahaman, bukan dominasi (Habermas, 1984). Dengan demikian, *qaulan layyin* dapat menjadi prinsip untuk menurunkan eskalasi konflik dan membuka kembali kemungkinan komunikasi lintas perbedaan.

Keempat, komunikasi transformatif merupakan prinsip yang menekankan bahwa pesan tidak cukup benar dan santun, tetapi juga harus mampu menyentuh kesadaran serta mendorong perubahan moral. Prinsip ini berakar pada *qaulan baligh* dalam QS. al-Nisa' [4]: 63. Secara bahasa, *baligh* berarti sampai, efektif, dan membekas. Al-Tabari memahami *qaulan baligh* sebagai ucapan yang mencapai hati dan memberi pengaruh (Al-Tabari, 2001), sedangkan al-Maraghi menegaskan bahwa pesan yang

baligh adalah pesan yang sesuai dengan kondisi psikologis audiens sehingga dapat diterima secara mendalam (al-Maraghi, 1993).

Dalam konteks mitigasi polarisasi, komunikasi transformatif diperlukan karena banyak pesan moral gagal bekerja bukan karena isinya salah, tetapi karena tidak mampu menjangkau pengalaman, emosi, dan cara berpikir audiens. Pesan yang benar tetapi kaku dapat ditolak; pesan yang santun tetapi tidak relevan dapat diabaikan. *Qaulan balighan* menuntut agar komunikasi publik dirancang secara kontekstual, argumentatif, dan menyentuh kesadaran sosial. Ia mendorong komunikator untuk memahami situasi penerima pesan, memilih bahasa yang sesuai, serta menyampaikan pesan dengan cara yang mampu mengubah cara pandang. Dalam konteks dakwah, pendidikan, dan komunikasi sosial, prinsip ini menempatkan komunikasi sebagai proses transformasi moral, bukan sekadar penyampaian informasi.

Kelima, komunikasi yang memuliakan martabat manusia merupakan prinsip yang menolak dehumanisasi, stereotip, penghinaan kelompok, dan ujaran kebencian. Prinsip ini berakar pada *qaulan kariman* dalam QS. al-Isra' [17]: 23. Walaupun ayat tersebut secara langsung berbicara tentang etika komunikasi kepada orang tua, makna etiknya dapat diperluas sebagai prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *qaulan kariman* adalah ucapan yang lembut, indah, dan penuh penghormatan (Al-Qurthubi, 2006). Quraish Shihab menegaskan bahwa *karim* tidak hanya berarti bebas dari kekasaran, tetapi juga mengandung penghargaan terhadap kedudukan pihak yang diajak bicara (Shihab, 2022).

Dalam polarisasi sosial, dehumanisasi merupakan salah satu tahap paling berbahaya karena membuat kekerasan simbolik dan sosial tampak dapat dibenarkan. Kelompok lain diberi label negatif, direduksi menjadi stereotip, atau diperlakukan seolah-olah tidak memiliki martabat yang sama. Waldron menegaskan bahwa ujaran kebencian merusak martabat sosial karena mengirim pesan bahwa kelompok tertentu tidak sepenuhnya

diterima sebagai anggota masyarakat yang setara (Waldron, 2012). Prinsip *qaulan kariman* menolak logika tersebut. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai subjek bermartabat, meskipun berbeda pandangan, identitas, atau afiliasi sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang memuliakan martabat manusia menjadi prasyarat penting bagi pemulihan kohesi sosial.

Keenam, komunikasi inklusif dan menenangkan menjadi prinsip yang memberi ruang, harapan, dan kemudahan bagi pihak yang lemah atau rentan. Prinsip ini berakar pada *qaulan maysuran* dalam QS. al-Isra' [17]: 28. Ayat tersebut mengajarkan bahwa ketika seseorang belum mampu memberi bantuan, ia tetap diperintahkan untuk menyampaikan ucapan yang baik dan mudah diterima. Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa *qaulan maysuran* mengandung tuntunan agar penolakan atau ketidakmampuan membantu tidak disampaikan dengan cara yang menyakitkan (RI, 2019). Al-Maraghi juga menekankan aspek kelembutan dan pemberian harapan dalam komunikasi semacam ini (al-Maraghi, 1993).

Dalam konteks polarisasi sosial, kelompok rentan sering menjadi sasaran stigma, generalisasi, dan eksklusi. Mereka bukan hanya menghadapi ketimpangan sosial, tetapi juga mengalami luka simbolik akibat bahasa yang menyalahkan, merendahkan, atau mengabaikan pengalaman mereka. Prinsip *qaulan maysuran* mengarahkan komunikasi pada sikap inklusif dan menenangkan. Komunikasi tidak boleh menambah beban psikologis kelompok yang sudah lemah, tetapi harus memberi ruang, harapan, dan pengakuan.

Keenam prinsip tersebut dapat disintesis ke dalam kerangka etika komunikasi Qur'ani sebagai berikut.



Gambar 2. Konstruksi Etika Komunikasi Qur'ani sebagai Kerangka Mitigasi Polarisasi Sosial

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kerangka etika komunikasi Qur'ani bekerja secara komprehensif. Pada lapis epistemik, *qaulan sadidan* memperbaiki kualitas informasi. Pada lapis etik-normatif, *qaulan ma'rufan* menjaga kepatutan bahasa. Pada lapis dialogis, *qaulan layyinan* membuka ruang percakapan yang tidak agresif. Pada lapis transformatif, *qaulan balighan* memastikan pesan moral dapat diterima dan berdampak. Pada lapis martabat, *qaulan kariman* mencegah dehumanisasi. Pada lapis inklusif-rekonsiliatif, *qaulan maysuran* menjaga agar komunikasi tidak melukai pihak yang lemah dan tetap memberi harapan sosial.

Dengan kerangka tersebut, etika komunikasi Qur'ani dapat digunakan untuk mengurangi polarisasi sosial melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, ia menekan polarisasi epistemik dengan menuntut validasi informasi dan kejujuran dalam komunikasi. Dalam masyarakat digital, polarisasi sering diperkuat oleh arus informasi yang tidak diverifikasi, narasi manipulatif, dan konten emosional yang menyulut kemarahan kelompok. *Qaulan sadidan* memberikan fondasi untuk membangun budaya komunikasi berbasis fakta dan tanggung jawab moral. *Kedua*, ia menekan polarisasi afektif dengan mengatur cara menyampaikan perbedaan. *Qaulan ma'rufan*, *qaulan*

layyinan, dan *qaulan kariman* membantu menurunkan kebencian, penghinaan, dan agresivitas verbal. *Ketiga*, ia menekan polarisasi sosial dengan membuka ruang dialog, transformasi, dan rekonsiliasi. *Qaulan balighan* dan *qaulan maysuran* menekankan bahwa komunikasi harus berdampak pada perubahan moral sekaligus memberi ruang bagi mereka yang rentan.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada upaya menggeser pembacaan ayat-ayat *qaul* dari etika tutur individual menuju etika komunikasi sosial. Dalam kajian tafsir, artikel ini memperlihatkan bahwa ayat-ayat *qaul* dapat dibaca secara tematik sebagai satu sistem nilai yang saling terkait. Dalam Islamic Studies, artikel ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki perangkat normatif untuk membaca problem sosial kontemporer, termasuk polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan krisis ruang publik. Dalam studi etika komunikasi, artikel ini menawarkan kerangka alternatif yang tidak hanya berbasis teori komunikasi modern, tetapi juga berakar pada tradisi normatif Qur'ani. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan tafsir tematik-kontekstual yang menghubungkan teks wahyu dengan problem masyarakat modern.

Kerangka ini juga menegaskan bahwa mitigasi polarisasi sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, seperti literasi digital, pemeriksaan fakta, atau regulasi platform. Upaya tersebut penting, tetapi belum memadai tanpa transformasi etik dalam cara masyarakat berkomunikasi. Informasi yang benar tetap dapat melukai jika disampaikan dengan bahasa yang merendahkan. Kritik yang sah tetap dapat memperuncing konflik jika dikemas dengan kebencian. Sebaliknya, komunikasi Qur'ani mengajarkan bahwa kebenaran harus berjalan bersama kesantunan, kelembutan, efektivitas, penghormatan martabat, dan inklusivitas. Inilah kekuatan kerangka *qaul*: ia tidak hanya menata isi pesan, tetapi juga menata karakter komunikator, relasi sosial, dan dampak moral komunikasi.

Etika komunikasi Qur'ani dapat dirumuskan sebagai kerangka normatif-konseptual untuk membangun komunikasi publik yang lebih sehat. Kerangka ini tidak hanya relevan dalam konteks dakwah atau pendidikan Islam, tetapi juga penting untuk menghadapi polarisasi sosial dalam masyarakat modern. Ketika ruang publik dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, prasangka kelompok, dan komunikasi agresif, prinsip-prinsip *qaul* menawarkan jalan etik untuk mengembalikan komunikasi kepada tujuan dasarnya: menyampaikan kebenaran, menjaga martabat manusia, membuka ruang dialog, dan merawat kohesi sosial.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat *qaul* dalam Al-Qur'an memuat prinsip etika komunikasi yang komprehensif dan tidak terbatas pada adab berbicara secara individual. Melalui pembacaan tematik terhadap formulasi *qaulan sadidan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan balighan*, *qaulan kariman*, *qaulan maysuran*, dan *qaulan layyinan*, ditemukan bahwa Al-Qur'an membangun etika komunikasi di atas enam nilai utama, yaitu kebenaran, kesantunan, efektivitas pesan, penghormatan martabat manusia, kemudahan, dan kelembutan dialogis. Keenam nilai tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi Qur'ani tidak hanya memperhatikan isi pesan, tetapi juga cara penyampaian, suasana psikologis, tujuan moral, dan dampak sosial dari ujaran manusia.

Dalam konteks polarisasi sosial, prinsip-prinsip *qaul* dapat dibaca sebagai respons etik terhadap krisis komunikasi yang ditandai oleh hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, penghinaan, dehumanisasi, dan eksklusivitas kelompok rentan. *Qaulan sadidan* menegaskan pentingnya komunikasi berbasis kebenaran dan tanggung jawab; *qaulan ma'rufan* menjaga keadilan dan kesantunan dalam perbedaan; *qaulan layyinan* membuka ruang dialog yang persuasif; *qaulan kariman* melindungi martabat manusia dari penghinaan dan pelabelan negatif; *qaulan balighan*

menuntut pesan yang efektif dan menyentuh kesadaran; sedangkan *qaulan maysuran* menghadirkan komunikasi yang inklusif, menenangkan, dan tidak menambah luka sosial. Sehingga, polarisasi sosial tidak cukup diatasi melalui pendekatan teknis-informatif, tetapi juga membutuhkan transformasi etik dalam cara masyarakat berbicara, mendengar, menilai, dan merespons perbedaan.

Konstruksi etika komunikasi Qur'ani yang dirumuskan dalam artikel ini menempatkan prinsip-prinsip *qaul* sebagai kerangka normatif-konseptual untuk memitigasi polarisasi sosial. Pada tingkat personal, prinsip tersebut membentuk karakter komunikator yang jujur, santun, lembut, dan bertanggung jawab; sedangkan pada tingkat sosial, prinsip tersebut berfungsi untuk menekan disinformasi, menurunkan agresivitas verbal, menjaga martabat pihak yang berbeda, serta membuka ruang dialog dan rekonsiliasi. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya menggeser kajian ayat-ayat *qaul* dari pembacaan normatif-deskriptif menuju pembacaan tematik-kontekstual yang relevan bagi kajian tafsir, *Islamic Studies*, dan etika komunikasi kontemporer. Al-Qur'an dapat dipahami bukan hanya sebagai sumber adab personal dalam bertutur, tetapi juga sebagai sumber etika sosial untuk merawat kohesi masyarakat di tengah fragmentasi ruang publik modern.

Referensi

- al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi* (Terj. Bahrin Abu Bakar dkk.). Toha Putra.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Tabari. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Dar Hajar.
- Anggraini, N. (2023). Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-Qur'an. *JOCIS: Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 301–316. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.242>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Desi Erawati, L. (2019). Social Media and Communication Ethic in Islamic Perspective. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(1), 27–46. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.27-46>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Hulawa, D. E., & Kasmianti, K. (2025). Qaulan Sadida as A Qur'anic Framework For Revitalizing Character Building in the Digital Era. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 6(2), 292–309. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v6i2.1144>
- Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, Not Ideology. *Public Opinion Quarterly*, 76(3), 405–431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>
- Kathir, I. (n.d.-a). *Commentary on 17:28*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Kathir, I. (n.d.-b). *Commentary on 20:44*. In *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Kathir, I. (n.d.-c). *Commentary on 4:5*. In *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Tayyibah.
- Khairuddin, K., Husin, H., Usman, U., Muhlasin, M., & Romadi, P. (2023). The Principles of Internalization of Qawlan Ma'rufa Perspective of the Quran and it's Relevance to Ethics Contemporary Communication. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 24–61. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2352>
- Khasanah, F. (2019). The Qur'anic Communication Ethics in Social Media. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(1), 151–167. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.151-167>
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2022). A Systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Digital Media and Democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Lubbers, M. J., Bukowski, M., Christ, O., Jaspers, E., & Van Zalk, M. (2025). The Impact of Social Norms on Cohesion and (De) Polarization. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.10984>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42. <https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), 234–271.

<https://doi.org/10.1177/0002716218818782>

Nations, U. (2020). *United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech: Detailed Guidance*.

O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for Reporting Qualitative Research. *Academic Medicine*, 89(9), 1245–1251. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388>

RI, B. L. dan D. K. A. (2019). *Al - Qur'an dan Terjemahannya*.

Rokim, S., & Triana, R. (2021). Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 409–424. <https://doi.org/0.30868/at.v6i02.2057>

Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.

The Quranic Arabic Corpus. (2025). Corpus.quran.com. <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qwl>

United Nations in Indonesia. (2024). *Launch of the United Nations Global Principles for Information Integrity – with Contributions from Indonesia*. <https://indonesia.un.org/en/272412-launch-united-nations-global-principles-information-integrity---contributions-indonesia>

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

Wahyudi, W., Amalia, Y., Asriani, P., Wicaksono, R. N., & Martabillah, M. D. (2025). Social Media Ethics from the Perspective of the Qur'an through a Study of Qaulan Values in Digital Communication. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 14(2), 252–265. <https://doi.org/10.36668/jal.v14i2.1527>

Waldron, J. (2012). *The Harm in Hate Speech*. Harvard University Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.

Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 273–292. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>